PENERAPAN PRINSIP *AGILE ORGANIZATION* (ORGANISASI TANGKAS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PURWOREJO

Indah Setiyowati
NPP. 33.0454
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: indahsetiyowati12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si
Email: maris@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The regulation of Street Vendors (PKL) by public organizations requires organizational governance that is adaptive, responsive, and flexible to field dynamics. However, the implementation of Agile Organization principles within local government institutions, particularly the Civil Service Police Unit (Satpol PP), has not yet been fully institutionalized in organizational systems and mechanisms.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of Agile Organization principles within the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Purworejo Regency in regulating street vendors.* ***Method:*** *This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by qualitative data analysis software.* ***Result:*** *The findings indicate that the implementation of Agile Organization principles within the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Purworejo Regency has not yet been comprehensively realized across the dimensions of people, strategy, process, structure, and technology. In the people dimension, a humanistic approach was found in the implementation of street vendor regulation; however, the capacity of human resources remains uneven. In the strategy dimension, the organization has implemented persuasive and adaptive regulatory strategies in response to field conditions. In the process dimension, routine evaluations and operational flexibility were identified in task implementation. In the structure dimension, internal coordination has functioned adequately, although organizational structural flexibility remains limited. Meanwhile, in the technology dimension, social media and digital documentation have been utilized to support street vendor regulation activities, although technological facilities and infrastructure are still not optimal.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of Agile Organization principles within the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Purworejo Regency in regulating street vendors demonstrates a tendency toward organizational*

adaptability, although it has not yet been fully integrated across all dimensions of Agile Organization.
Keywords: *Agile Organization; Public Organization; Street Vendor Regulation; Civil Service Police Unit (Satpol PP).*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh organisasi publik menuntut tata kelola organisasi yang adaptif, responsif, dan fleksibel terhadap dinamika lapangan. Namun, penerapan prinsip Agile Organization pada instansi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masih belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam sistem dan mekanisme organisasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam penertiban PKL. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya terwujud secara komprehensif pada dimensi people, strategy, process, structure, dan technology. Pada dimensi people ditemukan adanya pendekatan humanis dalam pelaksanaan penertiban PKL, namun kapasitas sumber daya manusia belum merata. Pada dimensi strategy, organisasi telah menerapkan strategi penertiban yang persuasif dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Pada dimensi process ditemukan adanya evaluasi rutin dan fleksibilitas operasional dalam pelaksanaan tugas. Pada dimensi structure, koordinasi internal telah berjalan, tetapi fleksibilitas struktur organisasi masih terbatas. Sementara itu, pada dimensi technology telah dilakukan pemanfaatan media sosial dan dokumentasi digital dalam mendukung pelaksanaan penertiban PKL, meskipun sarana dan prasarana teknologi masih belum optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam penertiban PKL menunjukkan adanya kecenderungan organisasi yang adaptif, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh pada seluruh dimensi Agile Organization.

Kata kunci: Agile Organization; Organisasi Publik; Penertiban PKL; Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, termasuk tumbuhnya sektor informal sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk nyata sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang

berperan dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat. Namun, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik sering memunculkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan pemanfaatan ruang publik sehingga pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban tata ruang kota dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang dinamis, organisasi publik dituntut memiliki kemampuan merespons perubahan sosial secara adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wasistiono & Anggraini, 2019).

Keberadaan PKL pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat perkotaan maupun daerah. Keterbatasan lapangan pekerjaan formal mendorong sebagian masyarakat memilih sektor informal sebagai alternatif mata pencaharian sehingga jumlah PKL terus berkembang di wilayah-wilayah strategis dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan persoalan PKL tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan PKL memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat secara adaptif dan humanis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi tersebut diperkuat melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Satpol PP tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga pembinaan dan pencegahan (Kemendagri, 2023). Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, fungsi perlindungan masyarakat juga menempatkan pembinaan, pencegahan, dan pengelolaan ketertiban sosial sebagai bagian penting pelaksanaan tugas pemerintahan daerah (Eviany & Sutiyo, 2023). Sebagai organisasi perangkat daerah, Satpol PP juga dituntut menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif melalui koordinasi, pengaturan, dan pelayanan publik yang adaptif sesuai karakter organisasi pemerintahan daerah (Wasistiono & Rohmadin, 2023). Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan personel, anggaran, dan sarana operasional.

Dalam beberapa operasi penertiban, anggota Satpol PP bahkan masih menggunakan kendaraan pribadi akibat terbatasnya dukungan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan pelaksanaan tugas di lapangan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik juga terus berkembang. Masyarakat tidak hanya menuntut ketegasan aparat dalam menegakkan peraturan daerah, tetapi juga mengharapkan pendekatan yang lebih komunikatif, transparan, dan humanis dalam pelaksanaan tugas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pola hubungan yang lebih partisipatif antara organisasi publik dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat diterima secara lebih efektif, membangun kepercayaan publik, serta responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang (Eviany et al., 2025; Herzwurm et al., 2025). Kondisi tersebut menuntut organisasi publik bekerja secara cepat, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan situasi di lapangan. Organisasi modern pada dasarnya dituntut memiliki kemampuan adaptasi, penguatan

tata kelola, kolaborasi, dan responsivitas terhadap perubahan lingkungan organisasi guna menjaga efektivitas pelayanan publik (Benkirane et al., 2026; Saari et al., 2025).

Salah satu konsep yang relevan dalam menjawab tantangan tersebut adalah Agile Organization. Konsep ini menekankan kemampuan organisasi untuk bekerja secara adaptif, kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan dalam menghadapi perubahan. Dalam organisasi yang menghadapi situasi kompleks, kemampuan bekerja secara agile juga dipengaruhi oleh fleksibilitas sumber daya manusia, kemampuan merespons perubahan, serta keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan pengendalian organisasi (Bjerre & Leimbach, 2026; Flavio et al., 2025). Internalisasi prinsip Agile Organization pada organisasi pemerintahan juga dinilai dapat mendukung terciptanya pola kerja yang lebih sederhana, fleksibel, dan adaptif dalam pelaksanaan tugas birokrasi (Pitono, Kartiwi, 1979). Pada Kabupaten Purworejo, penegakan peraturan terkait PKL masih sering menimbulkan resistensi masyarakat. Penertiban PKL di eks Pasar Suronegaran pada Januari dan Februari 2025 memunculkan protes terkait kejelasan regulasi, relokasi, serta kurangnya pemberitahuan sebelum penertiban dilakukan (Kedu, 2025). Pemerintah Kabupaten Purworejo sebenarnya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL yang mengatur lokasi usaha, jam operasional, pembinaan, dan mekanisme sanksi bagi PKL. Akan tetapi, masih banyak PKL yang memilih berdagang di lokasi terlarang seperti kawasan alun-alun Purworejo. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya resistensi terhadap kebijakan penataan ruang dan penegakan regulasi. Dalam konteks tersebut, komunikasi pemerintahan menjadi aspek penting untuk membangun pemahaman publik, mengurangi resistensi, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Eviany et al, 2025). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen LKJIP Satpol PP Kabupaten Purworejo, jumlah personel yang tersedia masih jauh di bawah standar nasional sehingga memengaruhi efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penertiban (LKJIP, 2025:73).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan baik dari aspek internal organisasi maupun dinamika sosial masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip Agile Organization menjadi penting dikaji dalam konteks organisasi publik, khususnya Satpol PP, agar organisasi mampu menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan responsif dalam menghadapi dinamika penertiban PKL yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penertiban PKL serta berbagai tantangan organisasi dalam mewujudkan organisasi yang adaptif dan tangkas.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan penelitian dalam studi ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya dari aspek implementasi kebijakan dan penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga dari perspektif kapasitas organisasi publik yang adaptif dan tangkas. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada konflik penertiban, resistensi

masyarakat, efektivitas kebijakan, serta peran Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah. Sementara itu, kajian yang melihat bagaimana Satpol PP membangun fleksibilitas organisasi, komunikasi adaptif, koordinasi internal, serta kemampuan merespons perubahan situasi secara cepat masih relatif terbatas. Selain itu, penggunaan teori Agile Organization dari Aghina et al. (2018) sebagai pisau analisis pada organisasi publik, khususnya Satpol PP, juga belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada organisasi bisnis atau sektor privat, sehingga penerapan konsep Agile Organization pada Satpol PP di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Purworejo, masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis penerapan prinsip Agile Organization dalam pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP Kabupaten Purworejo.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan Satpol PP sebagai organisasi publik dalam beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat. Hingga saat ini, kajian mengenai Satpol PP masih didominasi oleh aspek penegakan kebijakan dan belum banyak menyoroti kapasitas organisasi dari perspektif *Agile Organization*. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka peluang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelincahan, responsivitas, dan adaptabilitas Satpol PP akan terbatas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Satpol PP dalam memperkuat tata kelola organisasi agar lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam pelaksanaan penertiban PKL.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), peran Satpol PP, serta implementasi kebijakan daerah terkait ketertiban umum. Penelitian Theresia Helen Simarmata berjudul *Strategi Satpol PP dalam Penataan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Metro* menemukan bahwa strategi persuasif dan pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP cukup efektif dalam membangun citra positif organisasi. Namun, pelaksanaan penertiban masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, rendahnya kesadaran PKL, serta kurangnya koordinasi antarinstansi (Simarmata, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Simarmata berfokus pada strategi penataan dan penertiban PKL, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan Agile Organization pada Satpol PP dalam penertiban PKL. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Agile Organization dari Aghina et al. (2018) yang tidak digunakan dalam penelitian Simarmata.

Penelitian Muhammad Hanif Baihaqi dkk. mengenai *Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang bagi Pedagang Kaki Lima di Surabaya* menemukan bahwa relokasi dan penataan PKL cukup berhasil melalui dukungan regulasi, koordinasi antarinstansi, dan dukungan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas dan masih adanya PKL yang

melanggar aturan (Baihaqi et al., 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek dan sudut pandang penelitian. Penelitian Baihaqi dkk. berfokus pada implementasi kebijakan penyediaan ruang bagi PKL sebagai bentuk penataan sektor informal, sedangkan penelitian ini berfokus pada Satpol PP sebagai organisasi publik yang melaksanakan penegakan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, penelitian ini menelaah aspek kelincahan organisasi melalui dimensi people, process, strategy, technology, dan structure.

Penelitian Septian Kana Pratama mengenai *Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Stabat Kabupaten Langkat* menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum belum berjalan optimal akibat keterbatasan personel, sarana prasarana, anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku (Pratama, 2024). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Pratama menitikberatkan pada peran Satpol PP dari aspek normatif, organisasi, dan sosial, sedangkan penelitian ini menganalisis kemampuan Satpol PP dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja menggunakan perspektif Agile Organization. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan tugas, tetapi juga kapasitas organisasi dalam merespons dinamika sosial secara adaptif.

Penelitian Muhammad Rofi Ramadhan dan Hesti Asriwandari mengenai *Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru* menemukan bahwa Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis melalui sosialisasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi, tetapi masih menghadapi kendala keterbatasan SDM, anggaran, serta rendahnya kepatuhan PKL (Ramadhan & Asriwandari, 2025). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Ramadhan dan Asriwandari berfokus pada peran Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip Agile Organization dalam mendukung efektivitas penertiban PKL. Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana Satpol PP mampu menjadi organisasi yang responsif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan.

Penelitian Pitaloka Dyah Purbosiwi mengenai *Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga* menemukan bahwa pelaksanaan penertiban belum optimal akibat keterbatasan jumlah personel, masalah relokasi, dan rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan yang berlaku (Purbosiwi, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pendekatan teoritis dan fokus analisis. Penelitian Purbosiwi lebih menitikberatkan pada pelaksanaan penertiban, hambatan, dan upaya yang dilakukan Satpol PP, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan Agile Organization sebagai perspektif kelembagaan untuk melihat kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan penegakan Peraturan Kepala Daerah terkait PKL.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar penelitian masih berfokus pada strategi penertiban, implementasi kebijakan, peran Satpol PP, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan penertiban PKL. Belum banyak penelitian yang mengkaji Satpol PP dari perspektif organisasi publik yang adaptif dan tangkas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek teori, objek, dan fokus penelitian. Dari aspek teori, penelitian ini menggunakan teori Agile

Organization yang dikemukakan oleh Aghina et al. (2018) sebagai pisau analisis. Dari aspek fokus penelitian, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan penertiban PKL, tetapi juga menilai bagaimana Satpol PP mampu bekerja secara responsif, fleksibel, dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini dilakukan pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam konteks penegakan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian terkait penerapan prinsip Agile Organization pada organisasi publik, khususnya Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKL.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), strategi penertiban, maupun implementasi kebijakan daerah semata, tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana Satpol PP sebagai organisasi publik mampu menjadi organisasi yang tangkas, adaptif, responsif, dan fleksibel terhadap dinamika sosial masyarakat. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek teknis penertiban, implementasi kebijakan, pendekatan persuasif, hambatan operasional, serta peran normatif Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Sementara itu, penelitian ini mengkaji tantangan penegakan Peraturan Kepala Daerah melalui perspektif organisasi publik yang adaptif. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori Agile Organization yang dikemukakan oleh Aghina et al. (2018) sebagai pisau analisis utama untuk melihat sejauh mana Satpol PP Kabupaten Purworejo mampu bekerja secara efektif, fleksibel, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan situasi lapangan. Penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan konsep Agile Organization dalam mengkaji organisasi Satpol PP, khususnya dalam konteks penertiban PKL dan penegakan Peraturan Kepala Daerah. Selain itu, penelitian ini memiliki konteks penelitian yang berbeda karena dilakukan di Kabupaten Purworejo, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kabupaten Purworejo sebagai daerah kabupaten memiliki karakteristik sosial dan dinamika masyarakat yang berbeda dibandingkan kota-kota besar yang lebih banyak menjadi lokasi penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana organisasi Satpol PP dapat membangun karakter organisasi yang tangkas dan adaptif dalam pelaksanaan penertiban PKL di daerah kabupaten.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mewujudkan Satpol PP yang tangkas, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam penerapan prinsip Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk dinamika organisasi, proses kerja, dan pengalaman para pelaksana di lapangan yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokus penelitian, yaitu Satpol PP Kabupaten Purworejo, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks nyata (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan teori Agile Organization yang dikemukakan oleh Aghina et al. (2018) yang meliputi dimensi strategy, structure, process, people, dan technology sebagai pisau analisis dalam mengkaji penerapan prinsip organisasi yang tangkas pada Satpol PP Kabupaten Purworejo. Penelitian dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo serta beberapa lokasi penertiban PKL di wilayah Kabupaten Purworejo. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, mulai Februari sampai Mei 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas organisasi dan pelaksanaan penertiban PKL. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terkait penerapan Agile Organization, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen organisasi, regulasi, laporan kinerja, foto kegiatan, serta arsip lainnya (Sugiyono, 2023). Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling karena informan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2023). Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri atas Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo, kepala bidang, kepala seksi, anggota Satpol PP, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Purworejo karena memiliki kewenangan serta pemahaman yang paling komprehensif mengenai kebijakan organisasi, strategi pelaksanaan tugas, dan penerapan prinsip Agile Organization dalam penertiban PKL. Sementara itu, informan lainnya dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam dari unsur pelaksana maupun pihak yang terdampak oleh kebijakan penertiban.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kinerja instansi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumentasi kegiatan yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2023). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi (Sugiyono, 2023).

Teknik analisis data menggunakan Template Analysis dengan bantuan perangkat lunak NVivo sebagai Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS). Metode ini dipilih karena mampu membantu peneliti mengorganisasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan maupun tema yang muncul dari lapangan. Proses analisis dilakukan melalui tahap familiarisasi data, open coding, pembentukan kategori dan tema, analisis hubungan antar tema, serta interpretasi hasil penelitian berdasarkan dimensi Agile Organization (Kristi Jackson, 2019). Penggunaan NVivo bertujuan meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam proses pengkodean data sehingga hasil analisis dapat disajikan secara lebih sistematis dan mendalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Agile Organization pada Satpol PP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) telah mencerminkan karakteristik organisasi yang cukup adaptif. Penerapan tersebut dianalisis melalui lima dimensi utama *Agile Organization*, yaitu *people*, *strategy*, *process*, *structure*, dan *technology*. Kelima dimensi tersebut saling berkaitan dalam mendukung kemampuan organisasi untuk merespons perubahan kondisi sosial masyarakat secara lebih fleksibel, responsif, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik.

Gambar 1 Hierarchy Chart Teori *Agile Organization*

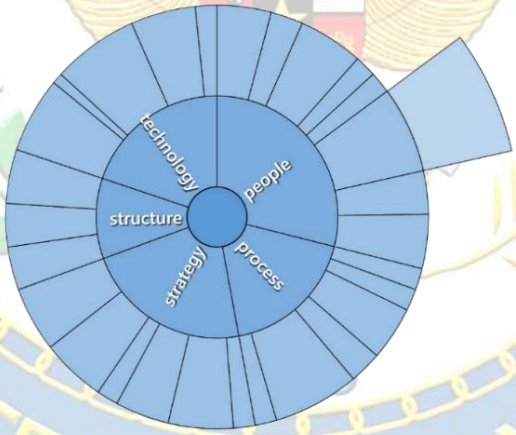

Diolah oleh peneliti dengan Nvivo, Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan NVivo, dimensi *people* menjadi dimensi yang paling dominan dalam penerapan *Agile Organization* pada Satpol PP Kabupaten Purworejo. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban PKL. Dalam konsep *Agile Organization*, kualitas organisasi tidak hanya ditentukan oleh aturan formal dan struktur birokrasi, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam beradaptasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Tabel 1 Tabel Hasil References Nvivo

Kategori Utama	Subkategori / Indikator	References
People	Budaya kerja tangguh	5
	Hubungan baik satpol pp dengan masyarakat	3
	Humanisme	6
	Kapasitas anggota	2
	Kepemimpinan yang baik	2
	Keterampilan anggota	-
	Komunikasi yang baik	8
	Kolaboratif	4
	Komitmen pelayanan publik	5
Process	Cepat tanggap	2
	Inovatif	2
	Kemampuan berinovasi	5
	Ketepatan pengambilan keputusan	3
	Mekanisme evaluasi	8
	Metode umpan balik	2
Strategy	Adaptif	2
	Humanisme	6
	Kejelasan arah dan visi	5
	Kemampuan membaca lingkungan eksternal	2
	Penyesuaian strategi	6
	Persepsi peran satpol pp	6
Structure	Fleksibilitas struktur	4
	Koordinasi lintas bidang	4
	Pembagian tugas	5
Technology	Dokumentasi digital	7
	Kemajuan teknologi	1
	Penggunaan media sosial	8
	Sistem pelaporan	6
	Transparansi	2

Diolah oleh peneliti dengan Nvivo, Tahun 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi yang baik menjadi subtema paling dominan dalam dimensi *people*. Berdasarkan Tabel tentang hasil references NVivo, komunikasi memperoleh 8 references, lebih tinggi dibandingkan subtema lainnya seperti humanisme, budaya kerja tangguh, maupun komitmen pelayanan publik. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi instrumen utama dalam mendukung kelincahan organisasi, khususnya dalam pelaksanaan penertiban PKL yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan penertiban juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Trantibumlinmas yang menyampaikan:

“PKL itu hanya masyarakat yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi kita harus tetap bisa humanis terhadap teman-teman PKL… peningkatan kemampuan berkomunikasi tentu menjadi inovasi dan senjata yang penting dalam pelaksanaan penertiban.” (Wawancara Tahun 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi diposisikan bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi operasional dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi resistensi terhadap tindakan penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah menerapkan pendekatan yang lebih persuasif dibandingkan pendekatan represif semata. Selain komunikasi, aspek humanisme juga menjadi bagian penting dalam dimensi *people*. Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pelaksanaan penertiban PKL di kawasan Alun-Alun Kutoarjo menunjukkan bahwa anggota Satpol PP melakukan pendekatan secara persuasif dan tetap mengedepankan sikap humanis kepada pedagang. penertiban PKL tidak langsung dilakukan dengan tindakan represif, tetapi memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pedagang mengenai aturan yang berlaku. Pendekatan humanis tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penertiban dari pendekatan koersif menuju pendekatan pelayanan publik yang lebih adaptif. Dalam perspektif *Agile Organization*, organisasi publik yang *agile* tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan humanisme dalam pelaksanaan tugas menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah berupaya menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan sensitivitas sosial. Selain komunikasi dan humanisme, budaya kerja tangguh serta komitmen pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam dimensi *people*. Anggota Satpol PP tetap menjalankan tugas patroli dan penertiban meskipun menghadapi tantangan di lapangan, seperti penolakan masyarakat dan kondisi lingkungan yang dinamis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dedikasi dan tanggung jawab anggota dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah. Dengan demikian, dimensi *people* menunjukkan bahwa penerapan *Agile Organization* pada Satpol PP Kabupaten Purworejo lebih banyak ditopang oleh kemampuan komunikasi, kerja sama, dan pendekatan humanis anggota di lapangan.

Pada dimensi *strategy*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah menerapkan strategi penertiban yang relatif adaptif dan humanis. Strategi penertiban tidak dilakukan secara langsung melalui tindakan represif, tetapi dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, teguran, pembinaan, hingga tindakan penertiban apabila pelanggaran terus berulang. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan penertiban PKL. Berdasarkan hasil analisis NVivo, subtema persepsi peran Satpol PP dan penyesuaian strategi menjadi aspek yang dominan dalam dimensi *strategy*. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparatur memahami perannya bukan hanya sebagai aparat penindak, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertugas menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa penertiban bukan hanya tindakan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Penerapan strategi yang adaptif terlihat dari kemampuan organisasi dalam menyesuaikan pendekatan penertiban berdasarkan kondisi di lapangan. Strategi yang digunakan tidak selalu sama pada setiap situasi, tetapi

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, kondisi masyarakat, dan potensi konflik yang muncul. Dalam konsep *Agile Organization*, kemampuan menyesuaikan strategi menjadi bagian penting dalam mendukung organisasi agar tetap responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Selain itu, kejelasan arah dan visi organisasi juga menjadi bagian penting dalam dimensi *strategy*. Satpol PP Kabupaten Purworejo telah memiliki tujuan yang jelas dalam menjaga ketertiban umum, khususnya dalam penataan kawasan PKL. Kejelasan arah tersebut menjadi pedoman bagi anggota dalam menjalankan tugas di lapangan. Namun demikian, strategi yang diterapkan tetap bersifat fleksibel sehingga organisasi dapat menyesuaikan metode penertiban sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Selanjutnya pada dimensi *process*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah memiliki mekanisme kerja yang cukup sistematis dalam pelaksanaan penertiban PKL. Proses kerja tersebut meliputi patroli rutin, pemberian teguran bertahap, pembagian tim operasi, hingga evaluasi setelah kegiatan penertiban dilakukan. Dalam *Agile Organization*, proses kerja yang adaptif tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas, tetapi juga pada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis NVivo, mekanisme evaluasi menjadi subtema paling dominan pada dimensi process dengan jumlah references tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki kesadaran untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan tugas berikutnya. Salah satu pejabat struktural menyampaikan:

"Setiap kegiatan penertiban pasti ada evaluasi, supaya ke depan bisa lebih baik." (Wawancara Tahun 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya dipahami sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi. Dalam konsep *Agile Organization*, evaluasi merupakan bagian penting dari *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang agile tidak berhenti pada pelaksanaan tugas semata, tetapi terus melakukan refleksi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Selain evaluasi, kemampuan berinovasi juga mulai terlihat dalam proses kerja organisasi. Satpol PP berupaya mengembangkan pendekatan yang lebih komunikatif dan humanis dalam pelaksanaan penertiban. Pembagian tim patroli dan penguatan koordinasi internal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas serta kecepatan respons organisasi dalam menghadapi pelanggaran di lapangan.

Pada dimensi *technology*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung komunikasi publik, dokumentasi kegiatan, dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil analisis NVivo, penggunaan media sosial menjadi subtema paling dominan dalam dimensi *technology*. Hal tersebut menunjukkan bahwa media digital telah menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi. Melalui observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa Satpol PP telah menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penertiban dan pelaksanaan Peraturan Daerah. Pada table dapat dilihat penggunaan media sosial terlihat bahwa media digital digunakan sebagai wadah komunikasi publik sekaligus sarana penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat. Selain media sosial, dokumentasi

digital juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Kegiatan penertiban didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bentuk arsip sekaligus pertanggungjawaban kepada publik. Kepala Satpol PP menjelaskan:

"Sekarang setiap kegiatan hampir selalu kami dokumentasikan dan kami unggah juga di media sosial supaya masyarakat tahu apa yang kami lakukan." (Wawancara Tahun 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki kesadaran mengenai pentingnya transparansi dalam pelaksanaan tugas. Media digital tidak hanya digunakan sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial terhadap tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP. Selain itu, organisasi juga telah memanfaatkan sistem pelaporan berbasis digital melalui website dan WhatsApp sebagai sarana pengaduan masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah berupaya meningkatkan efektivitas komunikasi dan transparansi organisasi. Dalam konsep *Agile Organization*, teknologi menjadi alat pendukung penting untuk mempercepat alur informasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.

Pada dimensi structure, hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo telah memiliki pembagian tugas dan koordinasi yang cukup jelas dalam pelaksanaan penertiban PKL. Struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang memudahkan pembagian peran dan tanggung jawab anggota dalam pelaksanaan operasi di lapangan. Berdasarkan hasil analisis NVivo, pembagian tugas menjadi subtema paling dominan pada dimensi *structure*. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki pembagian kerja yang jelas sesuai fungsi masing-masing anggota. Salah satu pejabat struktural menjelaskan:

"Sebelum turun ke lapangan biasanya sudah jelas siapa yang bertanggung jawab di bagian apa, jadi tidak tumpang tindih." (Wawancara Tahun 2026)

Kejelasan pembagian tugas tersebut membantu organisasi dalam melaksanakan penertiban secara lebih terarah dan efisien. Selain itu, koordinasi lintas bidang juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas. Penertiban PKL tidak hanya melibatkan satu bidang, tetapi memerlukan kerja sama antarbagian bahkan dengan perangkat daerah lain. Adapun pelaksanaan rapat bersama dinas pemangku kepentingan menunjukkan bahwa adanya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan penataan PKL. Hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan pola kerja kolaboratif sebagai salah satu karakteristik *Agile Organization*.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Agile Organization* pada Satpol PP Kabupaten Purworejo telah berkembang cukup baik pada seluruh dimensi, khususnya *people*, *strategy*, *process*, *technology*, dan *structure*. Penerapan tersebut terlihat melalui komunikasi yang persuasif, pendekatan humanis, strategi penertiban yang adaptif, evaluasi kerja yang berkelanjutan, pemanfaatan media digital, serta koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, Satpol PP Kabupaten Purworejo telah menunjukkan karakteristik organisasi yang cukup adaptif dan responsif dalam pelaksanaan penertiban PKL.

3.1 Diskusi Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya menerapkan prinsip Agile Organization sebagaimana dikemukakan oleh Aghina et al. (2018). Meskipun demikian, beberapa karakteristik organisasi yang tangkas telah terlihat dalam pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), terutama pada aspek komunikasi, pendekatan humanis, kemampuan beradaptasi terhadap situasi lapangan, serta koordinasi internal organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa agilitas organisasi telah mulai berkembang dalam praktik kerja Satpol PP, meskipun belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh dalam sistem, struktur, dan mekanisme organisasi.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Simarmata (2023) yang menemukan bahwa Satpol PP Kota Metro mengedepankan strategi persuasif dan pendekatan humanis dalam penataan serta penertiban PKL. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Purworejo juga lebih mengutamakan komunikasi, sosialisasi, dan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan penertiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan humanis telah menjadi salah satu strategi penting dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di berbagai daerah. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya melihat strategi penertiban, tetapi juga menganalisis bagaimana pendekatan tersebut mencerminkan karakteristik agilitas organisasi pada dimensi people dan process.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Ramadhan dan Asriwandari (2025) yang menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, patroli rutin, dan koordinasi lintas instansi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa koordinasi internal dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Purworejo. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan aturan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang adaptif.

Sama halnya dengan penelitian Pratama (2024) di Kabupaten Langkat dan penelitian Purbosiwi (2023) di Kabupaten Purbalingga, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sumber daya masih menjadi tantangan umum yang dihadapi Satpol PP di berbagai daerah. Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena keterbatasan tersebut dianalisis menggunakan dimensi Agile Organization, sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap kemampuan organisasi dalam beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan kerja.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Baihaqi et al. (2025) yang menemukan bahwa keberhasilan penataan PKL dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, dukungan regulasi, dan kemampuan pemerintah dalam melakukan penyesuaian kebijakan. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan Satpol PP dalam menyesuaikan strategi penertiban berdasarkan kondisi lapangan menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip agilitas organisasi. Namun, berbeda dengan penelitian Baihaqi et al. (2025) yang

berfokus pada implementasi kebijakan penyediaan ruang bagi PKL, penelitian ini berfokus pada kemampuan organisasi Satpol PP dalam menerapkan prinsip Agile Organization selama proses penertiban berlangsung.

Secara umum, temuan penelitian ini memperluas hasil penelitian sebelumnya karena tidak hanya menjelaskan strategi, peran, hambatan, maupun implementasi kebijakan penertiban PKL, tetapi juga mengkaji kemampuan organisasi Satpol PP dari perspektif Agile Organization. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agilitas pada Satpol PP Kabupaten Purworejo telah mulai terlihat pada dimensi people, process, strategy, technology, dan structure. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem organisasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian organisasi publik dengan menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban PKL tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan pelaksanaan tugas, tetapi juga oleh tingkat kelincahan organisasi dalam merespons perubahan dan dinamika sosial masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya menerapkan prinsip *Agile Organization* secara komprehensif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penertiban PKL telah ditemukan karakteristik *agilitas*, terutama pada aspek komunikasi persuasif, pendekatan humanis, adaptasi situasional, serta evaluasi kerja. Dimensi *people* menjadi aspek paling dominan melalui komunikasi yang baik dan orientasi pelayanan publik. Pada dimensi *process*, *strategy*, *technology*, dan *structure* juga terlihat adanya upaya penyesuaian, inovasi, serta koordinasi kerja. Namun, penerapan prinsip *agile* masih belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh karena beberapa indikator, seperti kapasitas SDM, fleksibilitas struktur, dan sistem berbasis data, belum berjalan secara optimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu sehingga penggalian data dan observasi terhadap dinamika penerapan Agile Organization di Satpol PP Kabupaten Purworejo belum dapat dilakukan secara mendalam dan berulang dalam berbagai kondisi kerja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan prinsip *agile organization* pada satpol PP Kabupaten Purworejo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andi Pitono, Kartiwi, A. R. B. (1979). *INTERNALISASI AGILE ORGANIZATIONS DALAM PENYEDERHANAAN ESELONISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI*. *14*(1).

Area, U. M. (2024). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN STABAT KABUPATEN LANGKAT Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area*.

Baihaqi, M. H., Puspaningtyas, A., & Basyar, M. R. (1945). *PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LOAK DUPAK RUKUN KOTA SURABAYA*. 1–12.

Benkirane, F., Oudra, M. A., & Errabih, S. (2026). *PUBLIC GOVERNANCE AND DIGITIZATION : TOWARDS A RENEWED ROLE FOR INTERNAL AUDITING*. *15*(2), 93–103. https://doi.org/10.22495/jgrv15i2art8

Bjerre, S., & Leimbach, T. (2026). Understanding multilevel paradoxes in agile projects : between autonomy and control in self-managing teams. *Project Leadership and Society*, *7*(December 2025), 100213. https://doi.org/10.1016/j.plas.2026.100213

Dr. Eva Eviany, M. S., & Sutiyo, SSTP, M.Si, P. . (2023). *Perlindungan Masyarakat : Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia.

Eviany, E. (2025). *Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Komunikasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban* (Issue October).

Flavio, J., Falla, S., Karwowski, W., Jahani, S., Rabelo, L., & Hancock, P. A. (2025). International Journal of Industrial Ergonomics Agile healthcare : The role of information technology ambidexterity and human resource practices fostering workforce agility and job performance. *International Journal of Industrial Ergonomics*, *110*(November 2024), 103818. https://doi.org/10.1016/j.ergon.2025.103818

Herzwurm, G., Petrik, D., Strobel, G., Kude, T., & Eds, L. B. (2025). *Software Business*. https://doi.org/10.1007/978-3-032-14518-5

Kabupaten, D. I. A., Provinsi, P., Tengah, J., & Purbosiwi, P. D. (2007). *PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Pitaloka Dyah Purbosiwi NPP. 30.0710*.

Kedu, S. M. (2025). *PKL Langgar Aturan Ditertibkan (ex-Pasar Suronegaran)*.

https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2114463206/pkl-langgar-aturan-ditertibkan?utm_source=chatgpt.com

Kemendagri. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. *Jakarta: Kemendagri.*

Kristi Jackson, P. B. (2019). *Qualitative Data Analysis with NVivo* (3rd ed.). SAGE.

Ramadhan, M. R., & Asriwandari, H. (2025). *Pelaksanaan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru*. *1*, 1–8.

Saari, A., Sinclair, S., Leshinsky, R., & Junnila, S. (2025). Best practices for blockchain-driven digital transformation in cross-industry settings ☆. *Digital Business*, *5*(2), 100127. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2025.100127

Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo (2025). *LKJIP*.

Simarmata, T. H. (2023). STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO. *Jurnal Progres Adinistrasi Publik*, *3*(1), 37–44. https://doi.org/https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.949

Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. ALFABETA, CV.

Wasistiono, S., & Anggraini, W. (2019). *THREE PARADIGMS IN GOVERNMENT (GOOD GOVERNANCE , DYNAMIC GOVERNANCE , AND AGILE GOVERNANCE)*. *4*(2), 79–91.

Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2023). *Teori Organisasi Pemerintahan Daerah*.